

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan internasional, negara memiliki legitimasi untuk menggunakan kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan tersebut dilakukan oleh negara melalui penyerangan dengan menggunakan kekuatan militernya. Penggunaan ancaman dan kekerasan sebenarnya sudah mulai dibatasi sejak diterapkannya Piagam PBB. Dalam Piagam tersebut, penggunaan ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh suatu negara sangat dilarang kecuali untuk alasan membela diri (*self-defence*). Namun, pada kenyataannya masih banyak negara yang melakukan ancaman dan kekerasan dan membenarkan hal tersebut dengan alasan *self-defence*. Seperti dalam insiden Kapal Mavi Marmara tahun 2010 atau yang disebut juga dengan insiden Flotilla 2010, pemerintah Israel menggunakan alasan *self-defence* dalam tindakannya menyerang kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara yang dilakukan oleh tentara *Israel Defence Forces* (IDF).

Pada 31 Mei 2010 tentara Israel menyerang Kapal Mavi Marmara yang merupakan kapal yang membawa misi kemanusiaan untuk pengungsi Palestina. Dengan harapan yang baik dari berbagai kalangan, kapal ini berangkat ke Gaza pada bulan Mei dalam rangka menarik perhatian dunia atas embargo tidak sah yang telah dikenakan terhadap Gaza oleh Israel selama lebih dari tiga tahun dan untuk membawa bantuan kepada orang-orang yang tinggal disana. Tujuannya untuk membawa bantuan kepada orang-orang dari Gaza dan agar blokade dapat dihentikan. Armada ini yang memperoleh legitimasi dari rakyat, dari hati nurani manusia, dan yang paling penting dari hukum Internasional, menjadi sasaran serangan teroris yang dilakukan oleh tentara Israel, dan semua orang di atas kapal itu dibawa secara paksa ke Israel.

Mavi Marmara merupakan sebuah kapal penumpang sejenis *ferry* yang dibeli oleh lembaga amal Turki dengan uang dari para donator dengan kapasitas penuh 800 orang, namun dengan pertimbangan kenyamanan, pihak IHH membatasi jumlah penumpang dalam misi menembus blockade ini hanya 600-an penumpang. (Ferry Nur 2010, hlm.53)

Kapal Mavi Marmara yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, mulai berlayar meninggalkan pelabuhan Antalya, Turki, Kamis malam waktu setempat, untuk bergabung dengan enam kapal lainnya di Laut Tengah. Beberapa kapal kemudian akan beriringan menembus blockade Israel menuju perairan sekitar jalur Gaza yang bisa ditempuh selama 15-20 jam. Pihak IHH (*Insan Hak ve Hurriyetli Insani Yardim Vakfi*) sengaja memberangkatkan Mavi Marmara di malam hari dengan harapan akan memasuki perairan Gaza sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Dalam kapal tersebut terdiri dari anggota parlemen dari beberapa Negara, artis dan seniman dan tentunya para aktivis yang bertentangan dengan kebijakan Israel memblokade Gaza.

Israel memperlihatkan suatu contoh tindakan ilegal dengan menghentikan suatu usaha pendobrakan atas embargo di Gaza yang merupakan hukuman kolektif bagi seluruh rakyat Palestina. Embargo ini dilakukan oleh Israel pada tahun 2008. Embargo yang dilakukan Israel bukan hanya embargo yang terletak pada bidang senjata namun juga pada bidang kehidupan lainnya seperti pangan dan sandang serta logistik obat-obatan. Hal ini tentu merugikan sekali bagi Palestina. Pada tahun 2008, Israel benar-benar melakukan embargo yang maha dahsyat terhadap Palestina. Embargo ini dilaksanakan pada segala bidang kehidupan. Sandang, pangan, obat-obatan, jual-beli dan lain sebagainya. Bantuan internasional pun tidak boleh diterima oleh Palestina. (Samir Basim 2008-2009, Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bidang Ekonomi Politik Internasional dalam Kasus Embargo Israel Terhadap Palestina di Jalur Gaza) Embargo inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat internasional merasa simpati untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun, bantuan tersebut harus berhenti tatkala Israel menyerang kapal Mavi Marmara yang membawa bantuan kemanusiaan tersebut. Aksi Israel ini sangat melanggar hak asasi manusia.

Aksi Israel yang melanggar hak asasi manusia lewat penyerangan ke Kapal Mavi Marmara kali ini memancing kemarahan dari masyarakat Internasional. Reaksi dan kecaman datang dari berbagai belahan dunia. Banyak negara-negara yang langsung memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel karena kemarahan atas penyerangan Israel ke kapal yang membawa misi kemanusiaan

tersebut. Seperti di Eropa dan Timur Tengah, ribuan demonstran turun ke jalan memprotes serangan Israel itu. Sedangkan negara lainnya seperti Spanyol, Prancis, Swedia, Norwegia, Denmark, Austria, dan Yunani memanggil duta besar mereka di Israel untuk meminta penjelasan terhadap penyerangan tentaranya. Presiden Mesir Hosni Mubarak menyebut penyerbuan itu sebagai penggunaan “kekuatan secara berlebihan dan tak dapat dibenarkan”. Sementara Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu, menyebut serangan Israel sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh negara dan menuntut permintaan maaf Israel segera, penyelidikan yang mendesak, serta tindakan hukum Internasional terhadap otoritas dan pelaku yang bertanggung jawab, dan mengakhiri blokade Gaza. Bahkan anggota Parlemen Israel pun mengecam serangan tersebut. Sementara itu, di Ankara, rakyat Turki meluapkan kemarahan mereka. Ribuan orang berdemonstrasi untuk memprotes serangan Israel.

Masyarakat internasional mengecam aksi Israel tersebut karena dalam pelayarannya kapal Mavi Marmara berada di wilayah laut lepas (perairan internasional) dan bukan di wilayah perairan Israel. Dalam perspektif hukum Internasional, Filosofi *mare libelum* (*free sea*) berlaku bagi semua kawasan samudra/laut lepas. Bahwa menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS*) tahun 1982, laut lepas tidak berada di bawah kedaulatan maupun yurisdiksi negara manapun. Di laut lepas, yang berlaku adalah kemerdekaan navigasi dan pelayaran. Setiap negara dapat menikmati kebebasan di laut lepas, diantaranya adalah kebebasan untuk berlayar. Kebebasan tersebut dilanjutkan dengan dijamin menurut Pasal 87 dari UNCLOS. (Agoes Mochtar Kusumaatmaja dan Ety R 2003, hlm.189)

Berbagai cara ditempuh untuk melawan aksi pasukan Israel yang telah menyerang relawan kemanusiaan untuk Gaza di Kapal Mavi Marmara. Peristiwa tersebut akan digugat melalui jalur hukum. Pengacara dari 60 negara siap mengajukan gugatan tersebut melalui pengadilan internasional atau forum lainnya. Para pengacara tersebut akan berkumpul di Istanbul, Turki pada tanggal 15-16 Juli 2010 untuk mempersiapkan gugatan tersebut. (Buntut Insiden Mavi Marmara, 2014) Kemudian sebanyak 42 pengacara dari berbagai belahan dunia juga berkumpul di Turki pada tanggal 15 Juli 2010. Mereka berencana

menyatukan sikap untuk menggugat Israel pasca insiden penyerangan terhadap Kapal Mavi Marmara. (Israel Selidiki Insiden Mavi Marmara, 2014) Insiden Mavi Marmara ini juga membuat Dewan HAM PBB medesak Israel untuk mencabut blokade militer yang dilakukannya untuk menutupi wilayah perbatasan Gaza serta mendesak Israel untuk mengundang tim pencari fakta guna menyelidiki insiden tersebut. Selain itu, Komite Dewan Keamanan PBB juga meminta Israel untuk menjamin hak asasi manusia dari warga Palestina di wilayah Israel. Dalam insiden Mavi Marmara ini, Israel mengakui kesalahannya dalam perencanaan penyerangan tersebut namun Israel juga menjustifikasi penggunaan kekerasan pasukan marinir Israel dengan alasan untuk membela diri (*self-defense*). Dampak insiden Mavi Marmara di bidang ekonomi dan keamanan inilah yang akan menjadi focus penelitian bagi penulis.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Insiden Mavi Marmara yang terjadi pada 31 Mei 2010 telah membuat hubungan Turki-Israel berada dalam posisi terburuk selama perjalanannya. Sebelumnya, hubungan kedua Negara tersebut bisa dikatakan sangat berkembang dengan lancar. Akan tetapi, terjadinya insiden Mavi Marmara dalam rangka misi kemanusiaan membuat hubungan keduanya berubah drastis. Turki menjadi murka terhadap Israel akibat tindakan Israel yang tidak manusiawi tersebut. Tidak hanya Turki, seluruh Negara Eropa termasuk Amerika Serikat dan juga seluruh masyarakat internasional mengecam buruk aksi penyerangan yang dilakukan oleh Israel tersebut. Pasca konflik tersebut, Turki meminta Israel untuk meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukannya itu. Namun, Israel menolak permintaan Turki tersebut, sehingga hal ini membuat hubungan keduanya semakin merenggang. Seiring berjalannya waktu, tahun 2013 Israel dan Turki berupaya memperbaiki hubungan diantara keduanya melalui mediasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari insiden Mavi Marmara ini, membuat penulis ingin mengetahui ***“Bagaimana hubungan diplomatik Turki-Israel pasca insiden Mavi Marmara periode 2010-2013?”***

### I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memahami hubungan Turki-Israel sejak keduanya membuka hubungan diplomatic hingga pasca insiden Mavi Marmara.
- b. Memahami Insiden Mavi Marmara.
- c. Memahami dampak Insiden Mavi Marmara terhadap hubungan Turki-Israel periode 2010-2013

### I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Praktis

Memahami bagaimana insiden Mavi Marmara memberikan pengaruh kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel dan hubungan diplomatik antara Turki dan Israel dan pasca insiden Mavi Marmara.

- b. Secara Akademis

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan suatu informasi dan data – data pendukung bagi jurusan Ilmu Hubungan Internasional khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### I.5 Tinjauan Pustaka

Begitu banyak literatur yang mengkaji dan membahas tentang dampak insiden Mavi Marmara terhadap hubungan Turki-Israel, adapun beberapa literature yang dijadikan tinjauan bagi penulis antara lain:

Dalam skripsi Carol Migdalovitz yang berjudul *“Israel’s Blockade of Gaza, the Mavi Marmara Incident, and Its Aftermath”* yang dimuat pada *Congressional Research Service* tanggal 23 Juni 2010. Carol fokus pada hubungan Turki-Israel sebagai dua aliansi Amerika. Tulisan tersebut fokus pada posisi dan keterlibatan Amerika dalam mengatasi konflik antara Turki dan Israel paska serangan Kapal Marvi Marmara. Soner cagaptay dan Tyler Evans menyoroti langkah dan kebijakan Amerika di bawah pemerintahan Obama dalam upaya mendamaikan dua negara yang menjadi aliansi Amerika tersebut. Tulisan ini menggambarkan

bahwa memanasnya hubungan politik tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi antar kedua negara. Keterlibatan Amerika dalam tulisan ini menjadi isu dan fokus yang juga akan menjelaskan bagaimana dinamika konflik antara Turki-Israel pada judul yang diajukan penulis. Relevansi dan konteks tulisan ini sangat terkait erat dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, baik dari sisi konflik maupun keterlibatan aktor.

Kedua, tulisan milik Andrej Makowski yang berjudul "*The Mavi Marmara Incident and the Modern Law of Armed Conflict*" yang ditulis pada *Israel Journal of Foreign Affairs Volume VII Nomor 2* tahun 2013 menekankan pada kronologis kejadian yang merupakan dasar dalam memahami konflik dari sisi hukum, yaitu peranan israel dalam mengamankan perbatasan Palestina dan Mesir yang menjadi celah bagi penyelundupan senjata yang dipasok ke dalam Palestina. Upaya Israel dalam pengamanan wilayah perbatasan tersebut merujuk pada pasal 51 Piagam PBB yaitu Hak untuk mempertahankan diri. Untuk itu, Andrej Makowski menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Israel sangat tepat dari sisi hukum mengingat blokade militer yang dilakukan Israel terjadi ketika Israel sedang menghadapi perang melawan Hamas. Isu yang dibahas pada tulisan ini mengaitkan erat antara blokade militer yang juga menjadi salah satu isu yang mendorong dinamika konflik Israel-Turki. Di sisi lain, fokus penelitian ini juga menjadi dasar bagi penulis dalam memahami bidang konflik, sehingga relevansi dan konteks tulisan ini dapat menjadi acuan bagi penulis dalam memahami dinamika konflik antara Turki-Israel.

Ketiga, tulisan dari *Dr. M. Elcan*, yang berjudul *Turkey-Israel In The Post Cold War Era*, *Yilmaz* mengemukakan bahwa hubungan antara Turki-Israel sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak Turki menjadi Negara muslim pertama yang mengakui kedaulatan Israel pada 28 Maret 1949. Hubungan Turki-Israel ini merupakan salah satu perubahan terbesar dalam manifestasi kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel. Jalinan hubungan keduanya juga telah mendapat restu dari Amerika Serikat yang mendukung hubungan keduanya dan mengharapkan bahwa Turki akan dapat menjadi salah satu Negara yang menciptakan proses perdamaian di Timur Tengah.

Dalam buku tersebut disebutkan juga pula, bahwa hubungan Turki-Israel

setelah Perang Dingin dimulai dengan adanya Perang Teluk tahun 1990. Selama krisis tersebut berlangsung, keduanya Turki dan Israel bersama membentuk koalisi untuk melawan pemerintahan Irak. Dalam waktu yang bersamaan pula, Amerika Serikat berupaya menjadi mediator dalam proses perdamaian di Timur Tengah dan mengharapkan Turki dapat berkontribusi terhadap proses perdamaian di Timur Tengah juga.

Keempat, jurnal dari *Efrain Inbar* yang berjudul "*Israeli-Turkish Tensions and Beyond*" menjelaskan bahwa Turki merupakan Negara yang penting bagi Israel dan keduanya telah memiliki hubungan yang baik sejak Turki mengakui kemerdekaan Israel sebagai sebuah negara. Dinamika hubungan keduanya berubah setelah tahun 1991, dimana Isarel dan Turki menguatkan hubungan mereka dalam strategic partnership yang mereka sepakati. Sebelumnya, di tengah tahun 1990-an keduanya telah mengembangkan hubungan diplomatiknya dalam bidang ekonomi dan militer. Namun, di abad ke-21, orientasi politik luar negeri Turki telah mengalami perubahan padahal Israel berkeinginan untuk menjaga hubungan yang kuat dengan Turki. Hal ini dikarenakan Turki mengecam keras aksi Israel yang mengikuti dalam invasi di Jalur Gaza Desember 2008 lalu atau yang lebih dikenal dengan *Operation Cast Lead*. Invasi ini bertujuan untuk untuk menghentikan serangan rudal terus menerus pada penduduk sipil israel oleh hamas. Invasi ini telah membuat hubungan keduanya menjadi tegang. Disamping itu, Turki juga secara tiba-tiba membatalkan latihan udara multinasional dalam "*Anatolian Eagle*" dengan Israel. Hubungan keduanya menjadi semakin tidak harmonis akibat adanya kejadian-kejadian tersebut sehingga mengubah orientasi politik luar negeri Turki yang berpengaruh pada politik regional. Dalam jurnal ini didapat kesamaan actor yang terlibat yaitu Turki dan Israel juga kesamaan dalam membahas sejarah dari hubungan Turki dan Israel dari yang awalnya baik hingga menjadi tegang. Namun, jurnal ini tidak membahas mengenai insiden Mavi Marmara, dimana insiden ini menjadi focus penelitian penulis dalam menganalisis hubungan Turki-Israel pasca insiden tersebut.

## I.6 Kerangka Pemikiran

### I.6.1 Kebijakan Luar Negeri

KJ. Holsti dalam bukunya *International Politics: A Framework for Analysis* menyatakan bahwa interaksi yang terjadi di dalam sistem internasional merupakan pokok bahasan studi politik internasional dengan asumsi jika komunikasi yang berlangsung memiliki dampak politik atau transaksi yang diselenggarakan dipacu untuk menjangkau tujuan politik. Sedangkan kajian tentang Negara dengan menekankan pada analisis tindakan Negara terhadap lingkungan eksternal serta berbagai faktor domestik merupakan fokus kajian politik luar negeri. (Holsti 1987, hlm.27) Dalam mencapai tujuan nasionalnya, maka Negara memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan internal. (Gowen, dkk dalam *A Framework for Analysis*, hlm.31-32) Dengan kata lain, politik luar negeri harus bisa beradaptasi dengan lingkungan internasional.

James Rosenau menyatakan bahwa kebijakan luar negeri diputuskan berdasarkan lingkungan yang terdiri dari obyek spesifik, pelaku dan situasi. (James Rosenau 1980, hlm.323) Masing-masing memiliki ciri berbeda yang mendorong suatu aksi politik. Sedangkan situasi adalah suatu faktor yang mendorong satu kebijakan diputuskan. Secara khusus, Rosenau menyatakan bahwa politik luar negeri pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme untuk Negara bangsa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di lingkungannya. Oleh karena itu, pemerintah dalam upayanya untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya harus menyeimbangkan tekanan internal dengan tuntutan eksternal dimana proses penyeimbangan ini mempunyai resiko dan bahkan kemungkinan disintegrasi. Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkup internal makin meningkatnya tuntutannya berkenaan dengan kondisi di lingkup eksternal atau ketika perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman bagi keberadaan Negara bangsa tersebut.

Dalam menggambarkan lingkungan internasional, maka Howard Lentner menjelaskan dua konsep yang disebut sebagai sistem internasional dan situasi. Sistem internasional adalah pola atau struktur hubungan diantara para actor besar. Sedangkan konsep situasi diartikan sebagai upaya untuk

mengidentifikasi pola-pola interaksi antara kedua Negara. Situasi (lingkungan eksternal) dan dorongan-dorongan dalam negeri akan membentuk politik luar negeri.

Konsep kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh KJ.Holsti adalah satu kebijakan pemerintah yang dijadikan langkah guna meminimalisir bentuk pelanggaran dan mengubah kondisi yang lebih baik. Holsti menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah ide-ide atau tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan untuk menghasilkan atau mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan, sikap atau tindakan suatu Negara yang penuh maksud (Holsti, *Op.Cit.*). Untuk mendapatkan atau mengubah kondisi yang lebih baik tersebut, Holsti menyebutkan ada tiga factor (*Ibid*) yang menentukan kebijakan luar negeri suatu Negara, yaitu:

- a. Faktor pembuat kebijakan luar negeri. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai, kepercayaan, kepribadian serta kepentingan politik dari mereka yang bertanggung jawab dalam menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mencapai sasaran tadi.
- b. Faktor internasional. Struktur sistem internasional, nilai-nilai yang dianut secara internasional seperti menentukan nasib sendiri (*self determination*).
- c. Faktor domestik. Dalam hal ini terdapat dua jenis kebutuhan domestik yaitu kepentingan kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri seperti kepentingan partai politik dan kepentingan organisasi ekonomi. Kedua adalah kebutuhan social ekonomi yang timbul karena keadaan geografi, demografi dan persediaan sumber daya alam Negara yang bersangkutan.

### ***1.6.2 Decision Making Theory***

Menurut Snyder *decision-maker* dalam suatu Negara bisa bertanggungjawab dengan dua aspects yaitu eksternal dan internal.(Richard C. Snyder 1962, hlm.67) Snyder juga menyebutkan “ *state action is the action taken by those acting in the name of the state*”( *Ibid*, hlm.65) berarti keputusan Negara akan mendasarkan atas persepsi dari pemimpin bangsa. Bisa dilihat dari prinsip Snyder, kebijakan luar

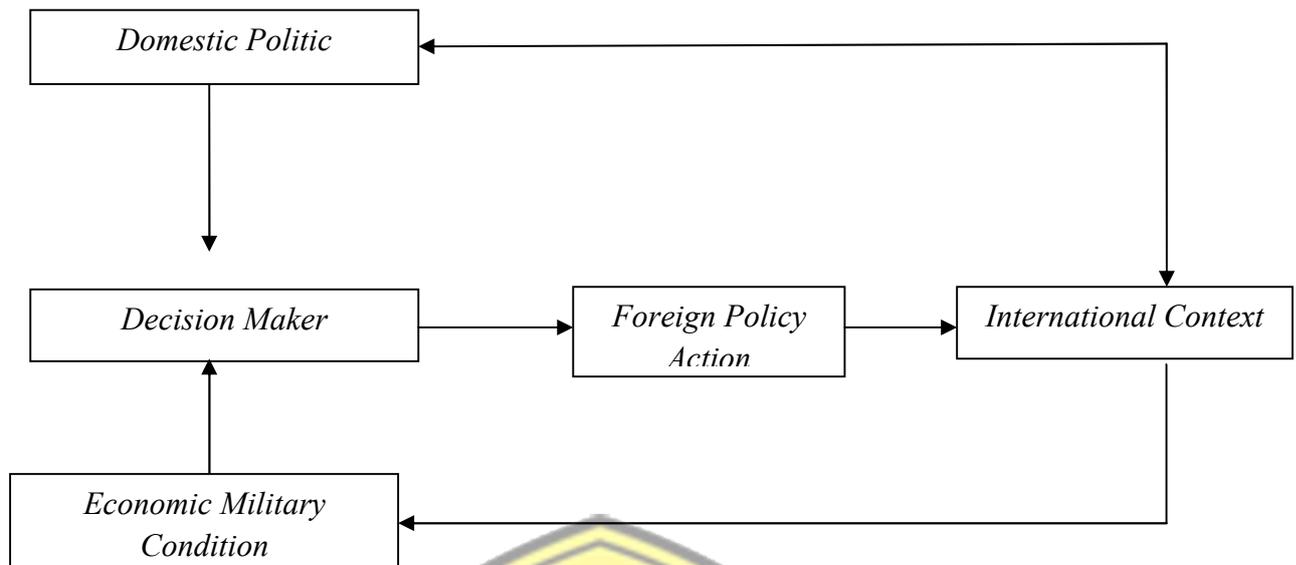
negeri suatu Negara akan diambil oleh pemimpinnya dengan pengaruh dari factor eksternal dan internal.

Teori pengambilan keputusan dan kebijaksanaan politik luar negeri yang dikemukakan oleh Coplin (1992,hlm.30) yang menyatakan:

*“ To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make decision. However, it would be mistake to think that foreign policy makers act in vacuum. On the contrary, any given foreign policy acr may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision makers state. The first is domestic politics within the foreign policy decision makers states. The second is economy and military capability of the state. The third is the international contex the particular position in which his state finds itself specially in relation to other state in system.”*

Menurut William D. Coplin, pengambilan suatu kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor determinan, yaitu:

- a. Situasi politik domestik, bahwa politik dalam negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri Negara-negara. Walaupun keterbukaan suatu system politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh system itu, bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor-faktor lain juga bisa bekerja didalamnya seperti kepribadian pengambilan keputusan atau struktur konsep internasional.
- b. Situasi ekonomi dan militer domestik, yaitu suatu Negara harus memiliki kemampuan dan kesedian untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.
- c. Konteks internasional, ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu Negara, yaitu geografis, ekonomi, dan politik. Lingkungan internasional setiap Negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan Negara-negara lain dalam system itu, dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara Negara itu dengan Negara-negara lainnya.



**Gambar 1 Skema Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri (Ibid)**

Dalam proses kebijakan luar negeri ada tiga model, yaitu:

- a. *Democratic model*, model ini berpegang bahwa kebijakan merefleksikan pilihan-pilihan public melalui proses pemilu dan institusi-institusi perwakilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan ini, berbagai kebijakan diformulasikan “*by the people, for the people*” dan pemerintah adalah penyambung mulut terpercaya masyarakat. Democratic model cenderung naif dan bahkan lebih sulit untuk diaplikasikan pada arena yang lebih tertutup dari foreign policy making dibanding wilayah kebijakan lain. (Brewer T.L 1992, hlm.34)
- b. *Pluralist model*, dalam model ini mayoritas publik tidak mendapat informasi, tiak tertarik dan tidak pula aktif dalam *decision-making process*, pengaruh mereka ada ditangan kelompok-kelompok kepentingan, masing-masing mempresentasikan satu bagian dari masyarakat. Pembuatan keputusan terdiri dari bargaining and compromise diantara pusat-pusat persekutuan kekuasaan. Kekuasaan terdesentralisasi, didistribusikan dalam beberapa segi, seperti kesejahteraan, pengetahuan dan kepentingan. Disini, mayoritas public tidak terlibat. Model ini telah dikritik karena terlalu bersandar pada

ukuran empiris dan behaviourism, saat beroperasi dibawah asumsi-asumsi normative yang meragukan dan tidak demokratis. Sebagaimana dalam model sebelumnya, kebijakan luar negeri kurang sesuai dalam kerangka ini dibanding kesesuaiannya pada kebijakan domestic. Namun, kemampuan pluralism untuk memahami salah satu system politik terkomples di dunia dan komprominya atas demokrasi ideal dan berbagai realitas politik yang keras, telah menjadikannya satu eksplanasi yang lebih populer dari yang lain.

- c. *Ruling elite* model, berasumsi bahwa keberadaan elit politik yang relative kecil dan bersatu menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya melalui pilihan-pilihan kebijakannya. Elit kadang terdiri dari sedikit keluarga kaya, kadang berbentuk apa yang disebut "*military industrial complex*", mungkin juga actor-aktor dari kelompok yang lebih berbeda. Para eksponen model ini biasanya berpendapat atas perubahan-perubahan sistemik dan structural dalam masyarakat, sebagai "*what holds (elites) together is their common interest in preserving a system that assures their continued accumulation of wealth and enjoyment of social privilege.*" (Ibid, hlm.40)

### I.7 Alur Pemikiran



## **I.8 Asumsi**

Berdasarkan uraian dari latar belakang hingga kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis, maka dapat ditarik asumsi bahwa adanya insiden Mavi Marmara membuat hubungan antara Turki-Israel mengalami perubahan yang cukup drastis. insiden ini menjadi titik puncak peregangan hubungan antara keduanya. Jalinan hubungan Turki-Israel yang telah berlangsung sejak lama harus berakhir karena kebrutalan Israel yang menyerang kapal Mavi Marmara saat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dimana saat itu tuan rumah dari bantuan ini adalah Turki. Turki memutuskan berbagai kerjasama yang telah disepakati sebelumnya dengan Israel baik dalam bidang pertahanan maupun ekonomi. Tiga tahun pasca insiden Mavi Marmara, kedua Negara bersepakat untuk memperbaiki hubungan harmonis yang telah hilang.

## **I.9 Metodologi Penelitian**

### **I.9.1 Tipe Penelitian**

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan normalisasi aliansi Turki-Israel pasca insiden Mavi Marmara

### **I.9.2 Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan statement-statement dari pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku-buku, jurnal dan artikel dan akses internet.

### **I.9.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*Library Research*), yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah

sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah ini. Sejumlah bahan tersebut diperoleh dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan seperti di perpustakaan maupun di lembaga-lembaga terkait.

#### **I.9.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian, bersifat Deskriptif Kualitatif. Menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya.

#### **I.10 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

akan dijelaskan pendahuluan, pembahasannya meliputi latar belakang yang akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, alur pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II INSIDEN MAVI MARMARA**

akan disampaikan pembahasan mengenai insiden Mavi Marmara serta hubungan Turki-Israel yang meliputi awal mula hubungan Turki-Israel, kerjasama Turki-Israel di bidang pertahanan dan ekonomi.

##### **BAB III ANALISA HUBUNGAN TURKI-ISRAEL PASCA INSIDEN MAVI MARMARA**

akan menganalisa hubungan diplomatik Turki-Israel pasca insiden Mavi Marmara mulai tahun 2011 hingga tahun 2013

##### **BAB IV PENUTUP**

akan menyimpulkan hasil penelitian terkait hubungan Turki dan Israel.

##### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **RIWAYAT HIDUP**